

**ANALISIS PERAN TVR PARLEMEN DALAM MEWUJUDKAN *OPEN*
PARLIAMENT MELALUI PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK PADA
*YOUTUBE DPR RI***

RAYI NIRBITA SARASWATI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TVR Parlemen dalam mewujudkan *Open Parliament* melalui penyediaan informasi publik pada kanal *Youtube DPR RI*, sebagai respon terhadap tuntutan transparansi dan upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pisau analisis teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meninjau enam variabel yakni: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Penegakan Hukum, Karakteristik Lembaga Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dan Disposisi atau Sikap Para Pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada pihak internal Biro Pemberitaan Parlemen, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Open Parliament* oleh TVR Parlemen secara prosedural telah berjalan dengan tersedianya siaran langsung rapat-rapat dewan, namun secara substansial masih menghadapi tantangan antara keterbukaan informasi dan kepentingan citra politik. Dari segi komunikasi ditemukan adanya distorsi akibat penerapan jurnalisme positif sehingga TVR Parlemen memiliki peran ganda sebagai media propaganda, yang membuat transparansi bersifat terkontrol dan menghindari isu sensitif. Kemudian secara sumber daya, kinerja yang dilakukan terhambat oleh infrastruktur teknologi yang diakibatkan politik anggaran sebab pengadaan peralatan tidak menjadi prioritas, padahal kuantitas dan kualitas SDM sudah memadai. Disposisi pelaksana menunjukkan dedikasi tinggi namun cenderung defensif sebagai upaya melindungi citra lembaga, didukung oleh struktur birokrasi yang rentan akan intervensi politik. Kesimpulannya, peran TVR Parlemen pada *Open Parliament* saat ini belum maksimal, akses informasi dibuka namun partisipasi publik dan akuntabilitas belum optimal sebab dominasi kepentingan citra lembaga.

Kata Kunci: *Open Parliament*, TVR Parlemen, Implementasi Kebijakan,
Youtube DPR RI.

**ANALYSIS THE ROLE OF TVR PARLEMEN IN REALIZED OPEN PARLIAMENT
THROUGH PROVIDING PUBLIC INFORMATION
ON THE DPR RI'S YOUTUBE**

RAYI NIRBITA SARASWATI

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of TVR Parlemen in realizing an Open Parliament through the provision of public information on the DPR RI Youtube channel, as a response to demands for transparency and efforts to increase public trust in the legislative institution. This research employs a descriptive qualitative method using Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, which reviews six variables Standards and Objectives, Resources, Inter-organizational Communication and Enforcement Activities, Characteristics of the Implementing Agencies, Economic, Social, and Political Conditions, and Disposition of Implementors. Data collection techniques included in-depth interviews with internal parties of the Parliamentary News Bureau, participant observation, and documentation. The results indicate that the implementation of Open Parliament by TVR Parlemen has proceeded procedurally through the availability, it still faces challenges balancing information openness with political image interests. In the communication indicator, distortions were found due to the application of positive journalism, resulting in TVR Parlemen having a dual role as propaganda media, making transparency controlled and avoiding sensitive issues. Regarding resources performance is hindered by technological infrastructure due to budget politics where equipment procurement is not prioritized, despite adequate human resource quantity and quality. The disposition of implementers shows high dedication but tends to be defensive in an effort to protect the institution's image, supported by a bureaucratic structure vulnerable to political intervention. In conclusion, the role of TVR Parlemen in the Open Parliament is currently not maximal, information access is open, but public participation and accountability are not yet optimal due to the dominance of institutional image interests.

Keywords: *Open Parliament, TVR Parlemen, Policy Implementation, Youtube DPR RI*